

Tantangan-tantangan Kesisteman Partai pada Aktivitas Kepemiluan: Kasus PPP dan PKB Sampang pada Pemilu Tahun 2009

Challenges in Party Activity System: The Case of PPP and PKB Sampang on Election 2009

Kris Nugroho¹

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

There were obstacles of party institutionalization reviewed from systemness dimension in electoral activities of PPP and PKB Sampang in legislative election 2009. In depth interview from informantsof PPP and PKB candidates showed that party systemness obstacles in candidates filtering activities, mass raising, campaigning and candidacy funding are more socio-cultural than institutional. This phenomena was strengthen with tendency in both party, that they will use kiai persona connections, kinship or pesantren connections for benefit of the candidacy than using party organization connections. Candidacy based on socio-cultural connections confirmed that party systemness was undeveloped. In the contrary, what happened was cultural candidacy by using persona linkages or kinship for benefit of the candidate.

Key words: party institutionalization, systemness, persona, candidacy

ABSTRAK

Tantangan-tantangan pelembagaan partai ditinjau dari dimensi systemness pada aktivitas kepemiluan yang melibatkan PPP dan PKB Sampang pada Pemilu legislatif 2009. Hasil wawancara mendalam dengan informan calon dari PPP dan PKB menunjukkan bahwa tantangan-tantangan systemness partai pada aktivitas penjangkaran calon, penggalangan massa, kampanye dan pendanaan pencalonan lebih bersifat sosio kultural dari pada institusional. Gejala ini diperkuat dengan kecenderungan di kedua partai yang lebih memilih menggunakan tautan-tautan ketokohan kiai, kekerabatan atau jaringan pesantren untuk kepentingan pencalonan daripada menggunakan jaringan organisasi partai. Pencalonan yang berbasis pada penggunaan tautan-tautan sosio kultural semakin menegaskan temuan bahwa systemness partai tidak berkembang. Sebaliknya, yang terjadi adalah cara pelembagaan calon yang bersifat kultural dengan memanfaatkan tautan-tautan ketokohan atau kekerabatan untuk kepentingan pencalonan.

Kata kunci: pelembagaan partai, systemness, ketokohan, pencalonan

Tulisan ini berupaya mengungkap kondisi kesisteman (*systemness*) PPP dan PKB Sampang pada pencalonan pada Pemilu legislatif daerah tahun 2009 yang didominasi penggunaan tautan-tautan sosio kultural. Dalam perspektif teoritik, tantangan-tantangan terhadap *systemness* partai semakin besar ketika penggunaan sumber-sumber politik personal bekerja lebih dominan daripada peran institusional yang dilakukan partai pada aktivitas kepemiluan. Untuk mengungkap bagaimana sesungguhnya *systemness* partai di era reformasi, maka dipilih

PPP dan PKB Sampang sebagai 'miniatur' untuk mengungkap permasalahan *systemness* partai dengan variabel analisis pada empat aktivitas kepemiluan, yaitu penjangkaran calon, penggalangan massa, kampanye dan pendanaan pencalonan dari calon PPP dan PKB Sampang pada Pemilu legislatif daerah tahun 2009.

Pertimbangan memilih PPP dan PKB Sampang didasarkan pada karakteristik sosio kultural di mana kedua partai tersebut berbagi pemilih yang sama, yaitu pemilih Islam dengan loyalitas tinggi

¹ Korespondensi: Kris Nugroho. Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Telepon: (031) 5011744. E-mail: bknug_65@yahoo.com

terhadap ketokohan kiai. Secara historik, pemilih Sampang memasok mayoritas suara bagi PPP dari Pemilu-pemilu era Orde Baru. Keunggulan PPP adalah klaimnya sebagai partai Islam (Radi 1984) dan penguasaannya atas sumber-sumber jaringan ketokohan kiai sehingga menjadi pemenang mayoritas suara selama beberapa Pemilu Orde Baru.

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru (1998) justru semakin memperkuat persaingan PPP dan PKB Sampang dalam memperebutkan sumber-sumber ketokohan kiai dan jaringannya pada Pemilu-pemilu pasca Orde Baru. Di luar institusi partai, persaingan calon pada kedua partai dalam memperebutkan pemilih dengan memanfaatkan simbol-simbol sosio kultural pada setiap Pemilu juga menguat. Tidak hanya berbagi pemilih yang sama, secara institusional, baik PPP dan PKB Sampang memiliki *genetic model* yang juga sama. *Genetic model* adalah konsep yang digagas Panebianco (Ware 1999) untuk menjelaskan asal-usul perkembangan partai. Dalam konteks *genetic model*, baik PPP dan PKB dibesarkan oleh kekuatan ketokohan kiai. Kemunculan PKB pada 1998, tidak lain merupakan resistensi internal ketokohan kiai dalam PPP yang kemudian mendeklarasikan PKB (Nahrawi 2005).

Munculnya PKB dan sejumlah besar partai-partai baru tidak mengurangi makna persaingan tradisional antara PPP dan PKB dalam memperebutkan suara pemilih Islam NU melalui tautan-tautan ketokohan kiai. Kuatnya persaingan ini tergambar dari persaingan elektoral antara PPP dan PKB sebagaimana pada terjadi pada beberapa Pemilu era reformasi.

Kemampuan PPP dan PKB untuk bertahan secara elektoral tak lepas dari peran tautan-tautan sosio kultural seperti ketokohan kiai, jaringan pesantren, dan kekerabatan. Kekuatan sosio kultural tersebut mampu diefektifkan partai dan calon sebagai instrumen penggalangan dukungan pemilih di desa-desa. Dalam beberapa kasus, jaringan politik ketokohan kiai dipertautkan ikatan kekerabatan. Dalam artian sosiologis, ikatan kekerabatan ini dapat terbentuk melalui peristiwa perkawinan antar anggota keluarga kiai baik dalam hitungan keluarga inti (*taretan dalem*) mau pun keluarga dekat (*taretan semma*) (Wiyata 2006). Melalui perkawinan antar keluarga kiai inilah, jaringan politik antar ketokohan kiai terjalin dan membentuk 'kerajaan' ketokohan yang relatif kuat untuk dijadikan sumber legitimasi partai.

Tabel 1
Perolehan Suara Pemilu-pemilu Orba untuk DPRD Sampang

Partai	Pemilu 1971	Pemilu 1977	Pemilu 1982	Pemilu 1987	Pemilu 1992	Pemilu 1997
PPP	210.188 (80,75%)	211.327 (75,97%)	233.150 (72,69%)	191.729 (56,46%)	14 kursi	12 kursi
Golkar	48.972 (18,82)	65.743 (23,63%)	85.832 (26,76%)	144.911 (42,67%)	22 kursi	23 kursi
PDI	1.129 (0,43%)	1.106 (0,40%)	1.757 (0,55%)	2.961 (0,87%)	-	-

Sumber: LPU (diolah)

Tabel 2
Peringkat Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sampang pada Pemilu 1999, 2004, 2009

No.	Partai	1999	Kursi	2004	Kursi	2009	Kursi
1	PKB	173.155	18	178.884	19	100.923	11
2	PPP	111.441	12	155.558	17	65.504	6
3	Golkar	18.989	2	22.889	3	19.818	-
4	PDI P	44.312	5	13.228	2	8.797	-
5	PKU	3.644	1	-	-	-	-
6	PAN	3.891	1	-	-	11.441	1
7	PNU	8.082	1	-	-	-	-
8	TNI Polri	-	5	-	-	-	-
9	Hanura	-	-	-	-	14.186	1
10	Gerindra	-	-	-	-	35.515	4
11	PKS	-	-	-	-	27.535	3
12	PDP	-	-	-	-	18.701	1
13	PKP	-	-	-	-	9.972	1
14	PBB	-	-	-	-	26.513	3
15	PBR	-	-	-	-	36.732	4
16	PD	-	-	-	-	27.094	3
17	PKNU	-	-	-	-	12.064	1

Sumber: DPRD dan KPU Kabupaten Sampang (diolah)

Walaupun peran ketokohan mampu memperkuat jaringan kepengikutan pada PPP dan PKB namun hadirnya kompetisi terbuka era multi partai tak urung telah menggerogoti dominasi tradisional kedua partai ini. Misalnya, pada Pemilu 2009, perolehan suara PPP dan PKB merosot tajam. Dibanding Pemilu 2004, perolehan kursi PKB di DPRD berkurang dari 19 menjadi 11 kursi dan PPP berkurang dari 17 menjadi 6 kursi. Terdapat dua hipotetik kondisi yang menyebabkan PKB dan PPP mengalami kemerosotan dalam perolehan suara pada Pemilu 2009.

Pertama, munculnya partai-partai politik baru sebagai pesaing politik baru yang sama-sama memperebutkan massa pemilih yang sama melalui instrumentalisasi ketokohan, telah menggerogoti dominasi elektoral PPP dan PKB. Kedua, terjadinya perubahan jaringan ketokohan dari pola lama dengan poros utama PKB dan PPP ke bentuk jaringan ketokohan 'baru' yang berhasil dibangun oleh aktor-aktor partai baru. Aktor-aktor partai politik baru ini bisa menggunakan tautan-tautan ketokohan atau menggunakan pengayaan jaringan politik baru yang lebih otonom tanpa bergantung pada ketokohan.

Dengan fokus pada *systemness*, tulisan ini akan mengungkap kondisi *systemness* PPP dan PKB Sampang pada aktivitas kepemiluan pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2009 dan tantangan-tantangan mereka dalam mencapai *systemness*.

Systemness: Telaah Teoritik

Untuk mengungkap kondisi *systemness* PPP dan PKB Sampang pada aktivitas penjangkaran calon, penggalangan massa, kampanye dan pendanaan pencalonan, saya memanfaatkan konsep *systemness* dari Randall dan Svasand (2002). *Systemness* merupakan salah satu dari empat dimensi yang digunakan Randall dan Svasand untuk menilai pelembagaan partai (*party institutionalization*). Empat kriteria pelembagaan partai dari Randall dan Svasand adalah *systemness*, *reification*, *value infusion* dan *decisional autonomy* (2002:13).

Pilihan menggunakan *systemness* didasarkan pada argumen bahwa konsep ini bisa dioperasionalkan untuk mengungkap kondisi-kondisi internal suatu partai dalam mencapai pelembagaan partai. Randall dan Svasand mengelaborasi pengertian *systemness* sebagai kemampuan partai untuk meningkatkan *scope*, *density* dan *regularity* dengan tujuan final memperkuat struktur partai. Namun kekurangan Randall dan Svasand adalah belum mengoperasionalisasi apa yang dimaksud dengan *scope*, *density* dan *regularity*. Keterbatasan

teoritik Randall dan Svasand perlu diikuti dengan pengembangan lanjut menyangkut makna *scope*, *density* dan *regularity*. Pengembangan teoritik ini penting karena ketiadaan operasionalisasi mengenai makna *scope*, *density* dan *regularity* menimbulkan kerancuan konseptual mengenai apa sesungguhnya makna *scope*, *density* dan *regularity* serta bagaimana kontribusi ketiganya terhadap *systemness*.

Saya mengembangkan makna *scope* sebagai keluasan dan kedalaman otoritas partai untuk menggerakkan sub-sub politik partai guna mencapai rutinisasi fungsi-fungsi politiknya. Perspektif ini mementingkan peran institusi dan prosedur-prosedurnya sebagai penggerak aktivitas politik (Macridis 1992:17, Blondel 1995:9). Jika hal ini diterapkan pada partai politik, demikian menurut Rothstein, maka bagaimana partai politik bekerja dapat dipelajari dari tindakan-tindakan para aktornya yang berkesesuaian dengan kepentingan partai.

Makna *scope* juga dapat diperluas sebagai kasus otoritas. Sebagai organisasi yang diorientasikan untuk terlibat dalam memperebutkan kekuasaan dan mendapatkan jabatan-jabatan politik melalui pemilihan umum (Rodee *et al.* 1967:317, Duverger 1959:4, Sartori 1984:63), partai politik membutuhkan otoritas dan dominasi sehingga mampu secara efektif mengimplementasikan keputusan-keputusannya pada lingkup partai. Dengan kata lain, *scope* menggambarkan efektivitas lingkup otoritas dan dominasi partai untuk mempengaruhi dan menciptakan loyalitas pada keseluruhan institusi partai. Adanya *scope* juga menggambarkan bekerjanya rutinisasi (Tomsa 2008:20) sehingga mempermudah partai mencapai tujuan-tujuannya.

Untuk *density*, saya mengembangkannya sebagai kepaduan antar unit-unit politik dalam partai. Partai yang kuat atau memiliki pelembagaan sebagaimana digagas Huntington (2003) adalah yang memiliki stabilitas dan koherensi. Dalam realitasnya, unit-unit dalam partai selalu dalam kondisi pluralitas baik dalam dimensi ideologis mau pun non ideologis. Dengan kata lain, setiap partai memiliki derajat pluralitas politik yang langsung atau tak langsung akan mempengaruhi kondisi internal partai, seperti faksionalisasi politik dan klientisme sehingga mengancam kohesi internal partai (Randall & Svasand:19-20).

Dalam artian Panebianco (Ware 1999) makna *density* dapat disejajarkan dengan *interdependence* yakni perpaduan unit-unit dalam partai untuk dalam kondisi saling bergantung dan menguatkan (*mutually reinforcement*). Semakin kuat interdependensi antar unit dalam partai, semakin mungkin partai terhindar

dari faksionalisasi politik internal. Sebaliknya, adanya faksionalisasi akan mengancam *systemness* partai. Dengan demikian, ketiadaan *interdependence* menggambarkan rendahnya derajat *systemness* partai.

Pengembangan saya mengenai *density* merujuk pada kapasitas kelembagaan partai untuk menghasilkan kohesi baik vertikal maupun horisontal dalam struktur partai. Kohesi vertikal merujuk pada pola relasi yang erat dan menyatu antara elite/aktor dengan partai. Kohesi horisontal menggambarkan pola relasi erat dan menyatu antar elite/aktor dalam partai. Dalam hal ini, *density* akan dimaknai sebagai kapasitas kelembagaan partai untuk mendorong dan menghasilkan pola relasi erat dan menyatu (kohesi) secara vertikal dan horisontal. Sebaliknya *density* rendah jika partai gagal mengembangkan kapasitas institusionalnya untuk meredakan potensi-potensi yang anti kohesi baik yang didasari kepentingan politik pribadi elite mau pun ideologis.

Refleksi teoritik konsep *density* dapat dipelajari dari studi Tan (2004) mengenai kondisi pelebagaan partai di Indonesia pasca Orde Baru. Tan menyimpulkan bahwa tantangan pelebagaan partai dibayangi oleh pembelahan-pembelahan komunalisme seperti politisasi etnis, agama, ketokohan dan daerahisme. Implikasi teoritik dari penjelasan Tan adalah *density* partai akan ambruk ketika elite partai terfragmentasi ke dalam komunalisme, baik dalam lingkup kepemimpinan (struktural) mau pun asal daerah (regional). Penjelasan Tan membantu mengungkap bagaimana implikasi pembelahan-pembelahan di dalam partai atas dasar personalisasi politik elite terhadap kekuatan *systemness*. Dengan demikian saya menawarkan pengembangan teoritik bahwa *density* berkaitan dengan kapasitas kelembagaan partai untuk mengatasi pluralitas kepentingan personal elite/calon menuju kohesi vertikal dan horisontal dalam partai.

Selanjutnya, pengembangan saya mengenai *regularity* bertolak dari Randall dan Svasand (2002:13). Mereka mengartikan *regularity* sebagai rutinisasi prosedur dan aturan partai sebagai penuntun perilaku elite partai. Menurut Randall dan Svasand, konsep *regularity* identik dengan *routinization* prosedur atau aturan-aturan ke dalam perilaku riil elite partai. Menurut perspektif saya, kapasitas partai untuk merutinisasi fungsi-fungsinya tidak hanya bergantung pada adanya prosedur atau aturan yang inheren dalam partai tetapi juga bergantung pada daya imperatif partai untuk mengimplementasikannya secara riil pada perilaku aktornya. Justifikasi *routinization* tidak akan

memberi efek pengaruh tanpa disertai imperatif karena imperatif menggambarkan daya paksa dan kendali partai untuk menghasilkan *legitimate order* dan kepatuhan aktor terhadap otoritas organisasi.

Pengembangan teoritik mengenai *regularity* merujuk pada kapasitas partai untuk *routinization* prosedur dan aturan-aturan partai yang mengikat elite/calon sehingga mereka tunduk pada partai sebagai institusi utama dan final. Penekanan *regularity* diarahkan untuk menjelaskan *systemness* dengan fokus pada dua hal. Pertama, menjelaskan keberfungsian fungsi partai sebagai instrumen elektoral. Kedua, menjelaskan kepatuhan elite/calon terhadap partai sebagai *legitimate order* tunggal.

Dari pengembangan makna *scope*, *density* dan *regularity* di atas, saya mengajukan empat karakter *systemness* partai. *Systemness* menggambarkan kemampuan partai untuk mengembangkan ruang pengaruhnya, kepaduan, interdependensi antar unit-unit partai serta rutinisasi fungsi-fungsi institusional partai. Setiap kecenderungan yang kontras dengan empat kriteria *systemness* tersebut dikategorikan sebagai degradasi *systemness* partai. Empat karakter *systemness* tersebut menjadi kerangka analitik mengungkap kondisi *systemness* PPP dan PKB Sampang pada aktivitas pemilihan yang meliputi penjangkaran calon, penggalangan massa, kampanye dan pendanaan pencalonan. Konsep teoritik yang diajukan selanjutnya untuk menakar *systemness* adalah *systemness* partai akan kuat jika unit-unit politik dalam partai berada dalam kondisi saling mendukung (*mutually reinforcement*) dalam memperkuat institusi partai. Sebaliknya *systemness* akan lemah jika unit-unit politik tersebut saling terurai atas dasar basis kepentingan politik personal (*personally fragmented interests*).

Tantangan-tantangan *Systemness*

Secara formal, PPP dan PKB Sampang memiliki kemampuan membangun rutinisasi penjangkaran calon sesuai prosedur-prosedur politik yang berlaku dalam masing-masing partai. Prosedur-prosedur politik merujuk pada kesepakatan politik dalam partai yang menuntun elite untuk berperilaku sesuai nilai-nilai partai (Randall & Svasand 2002). Berawal dari asumsi ini, PPP dan PKB Sampang memiliki kapasitas formal untuk mengontrol mekanisme pencalonan guna mendukung pencapaian *systemness* secara formal.

Penggambaran *systemness* secara formal dapat dijumpai dari pendapat Karp dan Banducci (2007). Keduanya menyatakan bahwa partai memegang

peran kunci dalam mobilisasi pencalonan, mulai dari rekrutmen hingga pengarakan jaringan partai untuk memobilisasi massa pemilih. Jika pendapat Karp dan Banducci tersebut diterapkan untuk menganalisis penjarangan calon, maka secara institusional, partai memiliki otoritas untuk membangun rutinisasi sesuai ketentuan formal yang berlaku dalam partai. Dalam pengertian seperti ini, *systemness* mengandung makna adanya pengakuan aktor atau elite partai akan adanya lingkup otoritas partai yang bersifat tunggal dalam menentukan penjarangan calon.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kecenderungan calon PPP dan PKB bersikap mendua selama proses penjarangan calon. Di satu sisi mereka loyal terhadap prosedur-prosedur penjarangan calon, tetapi di sisi lain mereka cenderung memilih menggunakan tautan-tautan personalistik ketokohan. Selain mempercayakan penjarangan calon pada mekanisme partai, bakal calon PPP dan PKB Sampang juga berupaya membangun tautan-tautan personalistik dengan ketokohan kiai atau non kiai untuk kepentingan legitimasi sosio kultural pencalonan mereka. Dalam hal ini, terdapat tiga pola yang menunjukkan aktifnya penggunaan tautan sosio kultural untuk legitimasi pencalonan mereka, yaitu calon menggunakan relasi ketokohan dengan tokoh kiai untuk mendapat restu, *trah* atau kekerabatan. Apa yang dilakukan bakal calon lebih menggambarkan suatu loyalitas klientilistik yang jauh melembaga secara kultural.

Konsekuensi penggunaan tautan-tautan sosio kultural ini menjadi awal gerakan menjauh terhadap institusi partai. Walaupun calon pada kedua partai loyal pada setiap prosedur penjarangan calon, namun penggunaan tautan-tautan sosio kultural sebagai sumber legitimasi pribadi justru menunjukkan proses gradasi terhadap makna otoritas partai sebagai instrumen utama untuk kepentingan pencalonan.

Tantangan terhadap *systemness* makin menguat justru pada fase penggalangan massa. Tantangan ini berasal dari karakter pencalonan yang lebih berorientasi pada instrumentalisasi jaringan politik pribadi berbasis ketokohan, kekerabatan atau *trah* masing-masing calon dari pada rutinisasi jaringan partai. Alih-alih menggunakan jaringan organisasi partai, para calon pada kedua partai tersebut semakin menjauh dari fungsionalisasi jaringan elektoral partai. Jika pada proses penjarangan calon partai mampu menghadirkan prosedur-prosedur *systemness* secara formal, justru pada aktivitas penggalangan massa relasi saling butuh yang saling menguatkan (*interdependence*) antara calon dengan partai tidak terjadi. Calon yang sejak awal penjarangan calon

membangun tautan-tautan sosio kultural berbasis pada jaringan ketokohan atau pun kekerabatan, justru semakin intensif melakukan pengakaran personal di desa-desa yang dipilih berdasarkan ketersediaan jaringan politik sosio kultural. Pengakaran personal tersebut tidak mencerminkan fungsionalisasi jaringan elektoral partai, tetapi lebih merupakan pengekstensifikasi dari jaringan politik pribadi calon di desa-desa, di seputar domilisi calon dan desa-desa, di mana jaringan politik pribadi calon kuat.

Gejala di atas bertolak belakang dengan karakter *systemness* sebagaimana digagas Panebianco mengenai *interdependence* (Ware 1999). Ada dua alasan mengapa tidak terjadi *interdependence*. Pertama, masing-masing calon pada PPP dan PKB Sampang aktif membangun basis dukungan politik berbasis jaringan politik pribadi yang berpusat pada ketokohan atau kekerabatan di desa-desa secara otonom ketimbang memanfaatkan jaringan partai. Kedua, partai gagal mengembangkan lingkup (*scope*) kontrolnya terhadap aktivitas penggalangan calon yang makin mengindividu, yang tidak lagi berpusat pada partai (Karvonen 2010).

Ketiadaan dimensi *interdependence* semakin menegaskan proses degradasi *systemness* PPP dan PKB Sampang, sebab masing-masing calon terfragmentasi atas dasar jaringan politik pribadi. Dari dimensi lingkup (*scope*) pengaruh partai, efektivitas mesin politik PPP dan PKB Sampang tidak berfungsi optimal untuk menopang rutinisasi (*routinization*) fungsi-fungsi politik partai yang berkaitan dengan pemilihan. Kemampuan otoritatif keduanya dalam menghadirkan *density* internal lemah, karena kedua partai ini gagal menghadirkan koherensi internal sebagai solusi mengatasi fragmentasi calon yang berbelah atas dasar tautan-tautan jaringan politik pribadi berbasis pada ketokohan dan jaringan sosio politiknya.

Kapasitas partai untuk mengembangkan otoritas kontrol yang rendah dapat ditunjukkan dari otonomi calon di kedua partai dalam menentukan zona kompetisi pencalonan. Dengan mengabaikan peran partai, pertimbangan calon dalam menentukan zona pencalonan lebih didasarkan pada ketersediaan jaringan politik pribadi berbasis ketokohan atau kekerabatan di desa-desa, daripada didasarkan pada penggunaan jaringan elektoral partai. Pola pendekatan yang berbasis pada tautan sosio kultural tersebut membuktikan dua hal. Pertama, pengemasan legitimasi kefiguran tokoh atau kekerabatan lebih penting dibanding rutinisasi jaringan elektoral partai. Kedua, pencalonan yang berpola patronase berbasis

lokalistik. Dua hal ini menjadi esensi dari strategi *survival* politik calon.

Penggunaan jaringan patronase oleh calon PPP dan PKB Sampang berjalan menguat karena beberapa alasan. Pertama, kompetisi pencalonan terbuka (*open list system*) telah mengubah karakter pencalonan makin mengindividu. Sistem pencalonan terbuka memberi insentif calon untuk memanfaatkan sumber-sumber politik dan non politik untuk meraih elektabilitas politik (Surbakti *et al.* 2009), termasuk memanfaatkan aspek ketokohan sebagai sumber legitimasi pencalonan. Kedua, kondisi calon yang kurang mengakar semakin mendorong calon di kedua partai memanfaatkan tautan-tautan sosio kultural untuk memperkuat elektabilitas politik mereka.

Karakter pengorganisasian yang sangat cultural, sebagaimana dilakukan calon-calon PPP dan PKB Sampang, kontras dengan argumen-argumen teoritik bahwa partai memegang kendali utama dalam proses mobilisasi politik untuk pemilihan (Wielhouwer 1999, Karp & Banducci 2007). Sebaliknya yang terjadi adalah pola pengorganisasian pencalonan yang lokalistik, berbasis klientalistik ketokohan dan kekerabatan, sebagaimana diutarakan seorang calon dari PPP:

"Kalau di Mandangin saya kebetulan punya paman *public figure* seorang kiai, di samping teman-teman Sidogiri itu mendukung. Di Mandangin saya tidak terlalu dikenal tetapi karena figur kiai itu, kiai Jauhari, saya bisa konsentrasi... teman-teman saya yang alumni pondok Sidogiri itu membantu..."

Strategi *survival* politik calon yang lokalistik dan sangat mengandalkan pada tautan-tautan non partai bisa menggambarkan suatu krisis pelembagaan partai dan krisis pengakaran calon. Dua hal ini mendorong calon memilih strategi politik lokalitas berbasis ketokohan sebagai alternatif untuk memperkuat elektabilitas mereka. Dalam aktivitas pemilihan yang berbasis ketokohan yang mengemuka bukanlah rutinsasi jaringan elektoral partai tetapi 'rutinisasi' jaringan politik pribadi calon untuk mendukung pencalonan mereka.

Dalam perspektif *systemness*, apa yang dilakukan calon PPP dan PKB Sampang jauh dari isu penting *systemness*, yakni saling butuh yang menguatkan (*mutually reinforcement*) antara calon dengan partai sebagai institusi pengusung pencalonan. Ketidakhadiran isu penting tersebut menggambarkan diskoneksi atau pecahnya kepaduan (*coherence*) antara calon dengan partai. Implikasi lebih jauh gejala yang menunjukkan anti *systemness* tersebut

sudah jelas yakni mengikis lingkup otoritas partai untuk merutinisasi fungsi-fungsi elektoralnya yang sejatinya telah dikendalikan dan diambil alih oleh jaringan politik pribadi calon.

Ada dua faktor mengapa rutinisasi partai mengalami degradasi. Pertama, faktor dominasi tautan-tautan non partai dalam setiap aktivitas pemilihan. Dominasi tautan-tautan non partai telah memarginalisasi peran partai dalam setiap aktivitas pemilihan. Kedua, efek penerapan pencalonan terbuka justru mendorong calon untuk memilih memanfaatkan tautan-tautan sosio kultural sebagai pijakan legitimasi pencalonan.

Dua faktor di atas menghalangi PPP dan PKB Sampang dalam mewujudkan *scope* dan *regularity* fungsi-fungsi elektoralnya. Sebagaimana digagas Randall dan Svasand (2002:13), *regularity* mengandung makna adanya rutinisasi baik prosedur-prosedur formal atau kesepakatan-kesepakatan internal partai yang menuntun tindakan politik partai dan elitnya, karena itu salah satu ukuran suatu partai mencapai *systemness* dapat dilacak dari kemampuannya untuk merutinisasi fungsi-fungsi politik secara stabil.

Gejala degradasi *systemness* juga terjadi pada pendanaan pencalonan pada PPP dan PKB Sampang. Kedua partai ini lemah dalam memobilisasi pendanaan pencalonan yang terbaru. Hal ini menggambarkan suatu permasalahan umum dalam kehidupan partai-partai politik di Indonesia yang tetap tidak berubah, yaitu lemahnya pengayaan sumber pendanaan pencalonan. Partai hanya mampu menggalang sumber pendanaan konvensional yaitu dari para pendaftar atau dari sumber anggota legislatif. Partai juga lemah dalam mengontrol pendanaan calon seiring pergeseran pola pencalonan yang makin mengindividu. Mengacu Tomsa (2010), *systemness* dalam pendanaan dapat dilacak dari konsistensi partai dalam merutinsasi penggalan sumber pendanaan politik. Dalam tradisi kepartaian di Indonesia era Orde Baru, kemampuan partai untuk mengakumulasi pendanaan pencalonan bisa diperoleh dari iuran anggota atau sumber pendanaan yang berasal dari yayasan dan organisasi yang sengaja diciptakan untuk mendukung keuangan suatu partai sebagaimana kasus Golkar (Tomsa 2010:40).

Dalam kasus PPP dan PKB Sampang, tidak ada inovasi yang secara khusus dilakukan untuk menggali dan memperkuat sumber pendanaan partai untuk kepentingan pencalonan kecuali dari penggalangan pendanaan yang ditarik dari para bakal calon. Sumber pendanaan partai masih bersifat konvensional karena diperoleh dari kontribusi

finansial dari calon anggota legislatif masing-masing partai. Kedua partai tersebut juga belum mampu merutinisasi penggalan pendanaan yang berasal dari anggota atau kader masing-masing partai.

Ketergantungan penggalan sumber pendanaan dari para bakal calon tersebut menggambarkan kelemahan pelebagaan partai pada tingkat jaringan dan simpatisan. Partai hanya mampu menggali sumber-sumber pendanaan pencalonan dari kalangan bakal calon saja. Ketidakmampuan partai dalam memperkaya sumber pendanaan pencalonan menyebabkan posisi calon lebih otonom sehingga partai tidak memiliki kekuatan tawar untuk mengendalikan aspek pendanaan pencalonan. Walaupun PPP dan PKB Sampang memiliki aturan atau prosedur aturan pendanaan pencalonan, hal ini belum menggambarkan adanya *substantive systemness*. *Substantive systemness* ini menggambarkan pengayaan partai dalam mengembangkan lingkup pengaruhnya memperkuat sumber-sumber pendanaan politiknya.

Dalam aspek pendanaan, tantangan yang dihadapi PPP dan PKB Sampang dalam mencapai *substantive systemness* terletak pada ketidakmampuan partai dalam mengontrol pendanaan pribadi dan penggunaannya pada aktivitas kepemiluan. Ada beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa PPP dan PKB Sampang tidak mampu mengontrol pendanaan calon.

Pertama, ketiadaan kesepakatan formal mengenai pelaporan pendanaan dan penggunaannya kepada partai. Ketiadaan regulasi pendanaan membuat relasi partai–calon makin renggang dan partai tidak memiliki legitimasi untuk menegakkan akuntabilitas pendanaan pencalonan. Kedua, partai membiarkan calon untuk mendongkrak elektabilitas calon di desa-desa yang dijadikan basis jaringan calon. Pembiaran tersebut mendegradasi otoritas, kohesi internal dan rutinisasi PPP dan PKB Sampang dalam mengontrol perilaku pendanaan calon yang makin otonom. Dengan demikian rendahnya kemampuan PPP dan PKB Sampang mencapai *systemness* tidak saja disebabkan oleh perilaku pendanaan calon yang makin otonom, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan internal partai yang secara tak langsung merusak kohesi internal partai–calon.

Walaupun kecenderungan umum menunjukkan bahwa kondisi *systemness* PPP dan PKB Sampang rendah, namun terdapat benang merah yang menunjukkan adanya derajat perbedaan *systemness* di antara mereka.

Pada tingkat *decision making process*, PPP memiliki kemampuan untuk membuat kesepakatan-

kesepakatan formal mengenai pendanaan dan pengayaan tema-tema kampanye yang mengikat calon dibanding PKB. Kemampuan PPP Sampang untuk 'melebaga' dimungkinkan karena struktur kekuasaan internal PPP lebih terkonsolidasi dibanding PKB Sampang, yang relatif terbelah karena faktor konflik ketokohan internal partai. Walaupun tidak eksplisit, implikasi konflik internal pada PKB Sampang mempolarisasi struktur kekuasaan internal sehingga peluang PKB Sampang untuk merutinisasi kelengkapan-kelengkapan *formal systemness* lemah. Adanya perbedaan kekuatan pelebagaan yang begitu tipis antara PPP dan PKB Sampang tetap tidak menutup fakta bahwa kemampuan mereka mencapai *systemness* lemah. Dapat dikatakan peran kelembagaan kedua partai tersebut kian menyusut (*shrinking party*), sebagai konsekuensi kegagalan mereka dalam mengendalikan perilaku calon yang makin mengindividu dalam merespons aktivitas kepemiluan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa cara pengorganisasian pencalonan para calon dari PPP dan PKB Sampang sangatlah kultural. Mereka kurang memanfaatkan jaringan organisasi partai untuk mendukung pencalonan mereka. Sebaliknya mereka lebih memilih menggunakan tautan-tautan ketokohan, kekerabatan dan jaringan politik pribadi untuk kepentingan pencalonan. Temuan ini bertolak dengan gagasan Panebianco (dalam Ware 1999) bahwa *systemness* membutuhkan sikap-sikap elite atau calon yang interdependensi. Justru yang terjadi tidak ada *systemness* karena masing-masing calon menggunakan jaringan politik pribadi untuk memperkuat elektabilitas pencalonan mereka. Implikasi teoritiknya, kemampuan partai untuk meningkatkan *scope*, *density* dan *routinization*, seperti digagas Randall dan Svasand (2002), tidak berkembang pada PPP dan PKB Sampang.

Dominasi Jaringan Patronase

Hasil temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa partai bukanlah instrumen pencalonan utama, sebagaimana disinggung Wielhouwer (1999), Karp dan Banducci (2001), dan Endersby et al. (dalam Katz & Crotty 2006). Dengan kata lain, kasus PPP dan PKB Sampang mengungkap kegagalan partai dalam membangun pelebagaannya, karena masing-masing calon tidak membutuhkan jaringan organisasi partai untuk mendukung pencalonan mereka. Alih-alih terjadi sinergi antara partai dan calon, kemampuan partai untuk mengembangkan otoritas, sehingga menemukan *density*-nya tidak terwujud,

karena calon terfragmentasi ke dalam jaringan tautan-tautan personal berbasis sosio cultural. Merekapun aktif mengolah jaringan ketokohan dan kekerabatan sebagai instrumen mobilisasi politik untuk kepentingan pencalonan mereka.

Analisis ini semakin memperkuat proposisi bahwa peran jaringan organisasi partai relatif tidak bekerja dan lemah, seiring penerapan *open list system*. Penggunaan tautan-tautan non partai yang merata pada semua calon dari PPP dan PKB Sampang menggambarkan proses delegitimasi institusional partai sehingga partai tidak efektif berkembang menjadi kekuatan elektoral yang kuat.

Kasus PPP dan PKB Sampang menunjukkan bahwa karakteristik pencalonan bersifat otonom. Calon adalah figur-figur sosial budaya yang aktif mengolah jaringan tautan-tautan sosiokultural sebagai instrumen-instrumen mobilisasi politik personal. Walaupun keberhasilan calon dalam menjalin jaringan politik dengan ketokohan tidak berkorelasi dengan keterpilihan calon, namun instrumentalisasi tautan-tautan sosio kultural diekspektasi calon sebagai penguat legitimasi pencalonan mereka. Hal ini sesuai dengan kondisi sosio kultural masyarakat yang bercorak patronase dengan loyalitas tinggi pada ketokohan agama. Dalam tipe masyarakat demikian, loyalitas pada ketokohan kiai bersifat menyeluruh dan menyentuh segala dimensi kehidupan. Faktor loyalitas pada ketokohan inilah yang dimanfaatkan calon untuk mengeruk limpahan dukungan pemilih yang umumnya berpola kepengikutan.

Model pencalonan yang digerakkan oleh jaringan politik pribadi calon mengarah pada proses *shrinking party*, di mana partai gagal merutinisasi peran-peran elektoralnya ketika dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan sosio kultural yang dijadikan instrumen mobilisasi politik para calon. Fenomena *shrinking party* menjadi pintu masuk untuk mengkritisi Karp dan Banducci (2001), Endersby et al. (dalam Katz & Crotty 2006) dan Wielhouwer (1999), yang berpendapat bahwa partai menjadi intrumen utama dalam aktivitas pemilihan.

Temuan ini justru menunjukkan bahwa partai tidak 'hadir' dalam aktivitas pencalonan yang didominasi oleh penggunaan tautan-tautan sosio kultural berbasis jaringan patronase. Aktifnya tautan dan jaringan patronase juga memutus koneksi antara pemilih dengan partai serta calon. Kalaupun terjadi koneksi yang menghubungkan antara pemilih dengan partai serta calon sifatnya semu atau palsu (*artificial*), karena penggambaran institusi partai telah digantikan sosok calon dengan ketokohan dan jaringannya yang membelakangi mereka. Dominasi

tautan-tautan ketokohan tersebut justru membuat rutinisasi fungsi-fungsi elektoral partai lumpuh.

Perjumpaan Struktural dan Sosio Kultural: Ikhtiar Teoritik

Berdasar argumen di atas, saya mengajukan kerangka teoritik yang menunjukkan kebaruan penelitian ini. Saya menemukan bahwa perjumpaan antara aspek-aspek struktural dan kultural yang bersifat internal dan eksternal berkontribusi menghalangi pencapaian *systemness* partai. Perjumpaan antara struktural dengan sosio kultural menghasilkan karakter kelembagaan partai yang dualistik. Di satu sisi partai dilihat sebagai institusi otoritatif, namun pada sisi lain partai juga dicermati sebagai institusi yang sarat muatan budaya, di mana ekspansinya mengandalkan jaringan sosio kultural. Pola pertama mengilustrasi partai sebagai institusi final, sedangkan pola kedua mengilustrasi partai sebagai institusi jaringan-jaringan patronase. Berikut ini skema teoritik perjumpaan struktural dan sosio kultural yang mempengaruhi kondisi *systemness* partai.

Faktor Penghalang Systemness Partai

	Internal dependensi ketokohan	Eksternal klientilistik/patronase
kultural		
struktural	inklusi ketokohan dalam partai	pencalonan terbuka

Aspek-aspek kultural yang datang dari internal partai, yang berpotensi menghambat pencapaian *systemness* partai adalah dependensi elite-elite partai terhadap ketokohan. Partai yang dibesarkan dalam konteks budaya klientilistik atau patronase (Hopkin 2006) membuka peluang bagi para elite untuk lebih dependen terhadap ketokohan. Hal ini menegaskan bahwa tantangan-tantangan *systemness* partai akan lebih besar jika kekuatan-kekuatan tradisi yang direpresentasikan melalui figur ketokohan agama maupun non agama memiliki pengaruh dominan dibanding institusi partai. Dominasi ketokohan tersebut menyebabkan gerakan partai untuk merutinisasi kesepakatan-kesepakatan, baik yang formal maupun non formal sebagai penuntun perilaku para elitennya, mengalami degradasi. Pada tataran pemilihan, rutinisasi yang mengatur penjaringan calon dapat dimentahkan oleh kepentingan-

kepentingan pribadi (*self-interest*) calon, yang lebih mempercayai faktor kedekatan ketokohan sebagai sumber legitimasi pencalonan daripada mempercayai mekanisme politik partai. Jika kekuatan dan pengaruh tradisi ketokohan berkembang mendalam dan calon sangat mengandalkan ekspansi elektoralnya pada jaringan ketokohan daripada jaringan partai, maka ancaman terhadap *systemness* partai akan semakin terbuka.

Saya menemukan bahwa aspek-aspek struktural yang menjadi penghambat *systemness* partai namun bersifat internal, adalah inklusi ketokohan dalam struktur partai. Inklusi ketokohan menjadi 'ciri kelahiran' (*genetic model*) PPP dan PKB Sampang yang dibesarkan melalui dukungan kekuatan ketokohan kiai. *Genetic model* membawa konsekuensi struktural terhadap PPP dan PKB Sampang yaitu turut membentuk format konstelasi kekuasaan partai, mempengaruhi corak keputusan institusional partai dan menciptakan loyalitas-loyalitas patronase politik dalam partai. Inklusi ketokohan tersebut berpotensi menghambat atau mengancam *systemness*, manakala elite partai atau calon memanfaatkan kehadiran ketokohan dan jaringannya untuk kepentingan penggalangan pemilih. Jika hal ini terjadi dalam pentas pemilihan, akan muncul pergeseran loyalitas, dari loyalitas kepada partai ke loyalitas ketokohan.

Pergeseran dan konsolidasi loyalitas tersebut merupakan awal dari tegaknya jaringan klientilistik atau patronase yang kontradiktif dengan aspek otonomi dan kedaulatan partai. Inklusi ketokohan bisa memperkuat kohesi partai jika kepemimpinan partai lemah, sehingga membutuhkan kehadiran ketokohan yang kuat dan mampu mempersatukan partai. Namun dalam jangka panjang, kehadiran ketokohan bisa beresiko memecah partai ke dalam faksionalisasi berbasis ketokohan. Namun pada sisi lain, kehadiran ketokohan dalam partai berpotensi mengecilkan makna identitas kepartaian calon jika yang diandalkan calon adalah ketokohan ketimbang institusi partai. Titik nadir kegagalan *systemness* partai terjadi ketika rutinisasi fungsi pemilihan partai mengalami degradasinya, karena digantikan personalisasi ketokohan dan jaringan politik pribadi yang berbasis klientilistik.

Konsekuensi *genetic model* yang diejawantahkan melalui inklusi ketokohan kiai ke dalam partai justru membuat posisi partai harus 'berbagi' otoritas dengan kekuatan-kekuatan ketokohan. Dalam perkembangannya, pertarungan dua 'otoritas' tersebut turut mendegradasi otoritas partai karena keotonomian partai sulit dipertahankan ketika

berhadapan dengan ketokohan informal yang berada di dalam maupun di luar struktur partai, yang kedalaman pengaruhnya mampu melampaui lingkup (*scope*) otoritas partai.

Walaupun PPP dan PKB memiliki persamaan dalam *genetic model*, dalam derajat tertentu implikasi *genetic model* terhadap kondisi *systemness* PKB dan PPP menampakkan kecenderungan berbeda. Pada PKB Sampang, *genetic model* bersifat mendalam, baik dalam formal politik partai maupun informal politik partai. Kehadiran ketokohan yang direpresentasi ke dalam struktur partai dan Tim Mantap justru membuat otoritas partai mengalami kehilangan daya kepengaruhannya. Faktor politik lain, mengapa inklusi ketokohan kiai pada PKB Sampang lebih mendalam dibanding PPP Sampang, adalah kebijakan PKB Sampang untuk menginklusi figur-figur kiai pro PKB yang berlatar belakang sebagai pengurus NU ke dalam tim seleksi calon dari tingkat Ranting hingga DPC. Inklusi faktor NU tersebut membuat calon PKB lebih intens mencari dukungan tokoh-tokoh kiai lokal atau desa pada era kampanye.

Mengapa intensitas relasi ketokohan calon PKB Sampang yang mendalam bisa dihubungkan dengan model inklusi ketokohan kiai pada PKB Sampang yang berlangsung secara struktural dan kultural? Pola struktural merujuk pada inklusi ketokohan kiai ke dalam struktur formal partai dari tingkat Ranting hingga tingkat Cabang, terutama untuk posisi Dewan Syuro dan Tim Seleksi Calon. Sedangkan pola kultural merujuk pada peran ketokohan kiai dalam proses politik partai berkat aura kepengaruhan, jaringan kepengikutan mereka.

Bukan berarti gejala yang sama tidak terjadi pada PPP. Ketergantungan PPP serta calonnya pada tautan-tautan ketokohan kiai dan jaringannya juga terjadi, tetapi dalam intensitas yang lebih rendah dibanding pada PKB. Hal ini terjadi karena format inklusi ketokohan yang berbeda pada kedua partai ini. Pada PPP Sampang, inklusi ketokohan kiai dalam ke struktur partai berlangsung dalam demarkasi yang jelas, di mana lingkup kepengaruhan ketokohan kiai dengan lingkup otoritas institusi partai terumuskan secara tegas (*rigid*). Adanya demarkasi ini memungkinkan PPP Sampang merutinisasi prosedur-prosedur politiknya secara *rigid* dibanding pada PKB Sampang, di mana posisi ketokohan kiai pada PKB Sampang memainkan fungsi struktural sekaligus kulturalnya selama proses seleksi calon. Berbeda dengan PKB, di mana inklusi ketokohan kiai berimplikasi pada bentuk pelibatan total kiai dalam proses penjaringan calon, tim seleksi calon

PPP lebih merepresentasi figur-figur otoritas partai yang relatif mampu menjaga jarak dari pengaruh ketokohan kiai.

Di luar faktor *genetic model*, aura kepengaruhan ketokohan kiai akan semakin mendalam jika relasi calon dengan ketokohan kiai dipertautkan oleh aspek perkawinan antara calon dengan kerabat kiai berpengaruh, dan aspek relasi guru–murid (kiai–santri), di mana calon dulunya adalah santri dari kiai berpengaruh. Pada PKB, relasi yang berbasis pada aura ketokohan kiai berpengaruh ini menghasilkan pola relasi yang memusat (*mono resource*) pada tokoh kiai utama sebagai sumber legitimasi sosio kultural pencalonan. Jaringan politik yang berpusat pada sosok ketokohan kiai utama ini kemudian diekstensifikasi calon untuk membangun kefiguran di desa-desa, di mana jaringan kepengikutan ketokohan kiai kuat.

Walaupun calon PPP juga membangun identitas politik personal sebagai 'orangnya' tokoh atau memanfaatkan legitimasi *trah*, namun mereka lebih kreatif membangun sumber-sumber politik yang *multi resources*. Pola *multi resources* merujuk cara calon PPP mengekstensifikasi lebih dari satu sumber legitimasi sosio politik, apakah berasal dari faktor ketokohan kiai, jaringan partai, jaringan LSM maupun jaringan ikatan pertemanan alumni. Dengan jaringan tersebut, calon mengembangkan pengayaan jaringan politik pribadinya secara variatif sesuai dengan potensi kekuatan jaringan politik pribadi yang dianggap mampu mendukung elektabilitas.

Pada PKB, aura ketergantungan pada ketokohan berlangsung mendalam, ketika personalisasi ketokohan diekspektasi calon lebih tinggi ketimbang rutinisasi partai. Dimensi personalisme inilah yang dijadikan landasan para calon PKB Sampang untuk memperkuat legitimasi sosio kultural mereka dengan cara membangun tautan-tautan ketokohan dengan kiai, baik pada tingkat desa hingga kecamatan, untuk memperkuat kefiguran mereka. Dengan kata lain, PPP memiliki kemampuan untuk mengembangkan *scope* pengaruh serta otonominya terhadap pengaruh ketokohan kiai kultural selama penjangkaran calon.

Kontribusi penting yang terbaru dari penelitian ini adalah pencalonan daftar terbuka bukan satu-satunya faktor yang turut menghalangi PPP dan PKB Sampang mencapai *systemness*. Memang pencalonan terbuka memberi insentif calon untuk bersaing bebas demi meraih kemenangan pemilihan (Surbakti et al. 2008:41). Demikian pula, pencalonan terbuka mendorong calon makin personal dalam membangun tautan-tautan politik untuk kepentingan pencalonan

(Karvonen 2010). Sebaliknya, kemampuan PPP dan PKB Sampang mencapai *systemness* didera dan dihalangi oleh tindakan calon di kedua partai, yang lebih memilih menggunakan tautan-tautan sosio kultural ketimbang menggunakan jaringan organisasi partai untuk kepentingan pencalonan.

Simpulan

Kondisi *systemness* PPP dan PKB Sampang pada aktivitas pemilihan penjangkaran calon, penggalangan massa, kampanye dan pendanaan pencalonan cenderung rendah. Pada empat aktivitas pemilihan tersebut, partai gagal mengembangkan pengaruh politiknya untuk merutinisasi fungsi-fungsi elektoralnya, karena calon lebih memilih menggunakan tautan-tautan sosio kultural untuk kepentingan pencalonan. Cara pengorganisasian pencalonan calon juga tidak didasarkan pada pertimbangan penggunaan jaringan organisasi partai, tetapi lebih didasarkan pada faktor ketersediaan jaringan politik pribadi calon di desa-desa. Melalui jaringan politik pribadi inilah calon 'melembagakan diri' dengan mengandalkan ketokohan atau kekerabatan sebagai ganti partai untuk mendukung pencalonan mereka.

Pola pengorganisasian pencalonan yang kultural menunjukkan model pengorganisasian pencalonan yang simbiosis mutualisme. Model ini menggambarkan cara 'pelembagaan' calon yang secara dominan menggunakan tautan-tautan sosio kultural dengan memanfaatkan partai sebagai instrumen formal pencalonan. Melalui pencalonan yang simbiosis mutualisme, baik partai mau pun calon sama-sama diuntungkan. Di satu sisi, calon berharap mencapai *survival* politik elektoral, dan di sisi lain adanya *survival* elektoral calon akan berdampak pada *survival* elektoral partai pada tingkat legislatif.

Daftar Pustaka

- Blondel J (1995) *Comparative Government*, An Introduction. London: Prentice Hall.
- Duverger M (1959) *Political Parties Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen & Co.
- Huntington SP (2003) *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hopkin J (2006) Clientilism and party politics. Dalam: Katz, RS & Crotty, W (eds). *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications. 406-412.

- Karp JA & Banducci SA (2007) Party mobilization and political participation in new and old democracies. *Party Politics* 13(2):217-234.
- Karvonen L (2010) *The Personalisation of Politics: A Study of Parliamentary Democracies*. Colchester: European Consortium for Political Research (ECPR).
- Katz RS & Crotty W (2006) *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications.
- Macridis RC (1992) Major characteristic of the traditional approach. Dalam: Susser, B (ed). *Approaches to the Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Co. 16-26.
- Nahrawi I (2005) *Moralitas Politik PKB Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern*. Malang: Averroes Press.
- Radi U (1984) *PPP dan Kepolitikannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ware A (1999) *Political Parties and Party Systems*. New York: Oxford University Press.
- Wiyata L (2006) *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Wielhouwer PW (1999) The mobilization of campaign activists by the party canvas. *American Politics Research* 27(April 1999): 177-199.
- Randall V & Svasand L (2002) Party institutionalization in new democracies. *Party Politics* 8(1):5-29.
- Rodee CC, Anderson TA & Christol CQ (1967) *Introduction to Political Science*. Second Edition. New York: McGraw-Hill.
- Sartori G (1976) *Parties and Party Systems A Framework for Analysis*. London: Cambridge University Press.
- Surbakti R, Supriyanto D & Santoso T (2009) *Pekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.
- Tomsa D (2008) *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Soeharto Era*. New York: Routledge.
- Tomsa D (2010) The Indonesian party system after the 2009 elections: toward stability? Dalam: Aspinall E & Mietzner M (eds.). *Problem of Democratisation in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 141-159.
- Tan PJ (2004) Party rooting, political operator, and instability in Indonesia: a consideration of party system institutionalization in a communally charged society. In: Southern Political Science Association, 10 January 2004, New Orleans. Louisiana: Southern Political Science Association.